GUBERNUR SULAWESI TENGAH

SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI DAN PENGUATAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN P3DN PEMDA PROVINSI SULAWESI TENGAH SELASA, 5 NOVEMBER 2024

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WAR, WAB,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,
OM SWASTIASTU,NAMO BUDHAYYA,
SALAM KEBAJIKAN, SALAM PANCASILA!
YANG SAYA HORMATI :

- DIREKTUR PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH, KEMENTERIAN

DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (HADIR VIA ZOOM)

- NARASUMBER DARI DIREKTORAT PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH, DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,
- PANITIA ACARA, HADIRIN DAN SELURUH PESERTA RAKOR YANG BERBAHAGIA,

PUJI DAN SYUKUR PATUT KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA KITA

MASIH BERADA DALAM KONDISI SEHAT UNTUK MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI DAN PENGUATAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN P3DN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,

UPAYA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN PASAL 85 BAHWA UNTUK PEMBERDAYAAN INDUSTRI DALAM NEGERI, PEMERINTAH MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI. DAN KEPADA SETIAP KEMENTERIAN, LEMBAGA, SERTA PEMERINTAH DAERAH AGAR 95% ANGGARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

DIALOKASIKAN UNTUK PRODUK DALAM NEGERI. HAL INI SEJALAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2022 YANG MEMERINTAHKAN KEPADA SELURUH UNSUR K/L/PD UNTUK BERINOVASI DAN MERANCANG STRATEGI YANG TEPAT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SEHINGGA MAMPU MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP IMPOR.

KOMITMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI INI BUKAN SEKEDAR MEMPERKUAT ANGKA DI ATAS KERTAS. INI ADALAH TENTANG BAGAIMANA KITA MENCIPTAKAN KESATUAN PIKIRAN, SEMANGAT, DAN LANGKAH STRATEGIS YANG DAPAT MENUMBUHKAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN YANG BAIK. KERJASAMA YANG MELAMPAUI BATAS-BATAS EGOITAS

INSTANSI KITA, YANG DIDASARKAN ATAS KOLABORASI, KOMUNIKASI YANG BAIK, DAN SEMANGAT YANG SAMA UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI DAN EKONOMI DALAM NEGERI. SEHINGGA PADA AKHIRNYA KITA BERSAMA-SAMA MAMPU MEWUJUDKAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN BAPAK PRESIDEN TERSEBUT.

MELALUI RAPAT KOORDINASI P3DN INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA HAL YANG MENJADI PRIORITAS UNTUK KITA LAKSANAKAN BERSAMA, YAITU:

1. P3DN MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN DARI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK SEHINGGA TARGET PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBESAR 95% MENJADI

TUGAS BERSAMA SELURUH UNSUR PEMERINTAH.

2. DIWAJIBKAN BAGI SELURUH INSTANSI AGAR SEGERA MELAPORKAN REALISASI P3DN KE DALAM APLIKASI P3DN-SIPD-KEMENDAGRI. MENGINGAT APLIKASI TERSEBUT YANG BARU BISA *RUNNING* KEMBALI, SEDANGKAN REALISASI BERJALAN SUDAH SAMPAI DI BULAN NOVEMBER, MAKA MOHON KERJASAMA DARI PIMPINAN INSTANSI UNTUK LEBIH MEMPERHATIKAN REKAN-REKAN OPERATOR DAN MENDUKUNG PENUH TERCAPAINYA TARGET TERSEBUT.
3. TIM P3DN YANG DIBENTUK PADA MASING-MASING INSTANSI KIRANYA DAPAT SECARA AKTIF IKUT MENGAWAL TARGET BELANJA PDN YANG TELAH

DITETAPKAN. SEBAGAIMANA PADA ARSITEKTUR KINERJA TAHUN 2025, P3DN AKAN MENJADI INDIKATOR KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG AKAN DIAMPU OLEH KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM. SEHINGGA DIHARAPKAN SEMUA ELEMEN YANG ADA DI DALAM SK TIM P3DN OPD DAPAT BEKERJA SAMA DENGAN BAIK.

4. SELURUH PERANGKAT DAERAH DIHARAPKAN AGAR TERTIB SEJAK PERENCANAAN, PERSIAPAN PENGADAAN, SAMPAI DENGAN REALISASI ANGGARAN. DIANTARANYA:
   - SAAT PERENCANAAN, AGAR MENGANALISA DENGAN BAIK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BARANG

DIMANA KITA DIWAJIBKAN MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DENGAN NILAI TKDN MINIMAL 25%, JIKA TIDAK ADA MAKA SILAHKAN MENGGUNAKAN URUTAN PRIORITAS PRODUK PDN SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU,

- PERANGKAT DAERAH YANG MENGUSULKAN SSH AGAR NILAI TKDN NYA MENGACU PADA DAFTAR INVENTARISASI BARANG KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
- WAJIB MENGUMUMKAN SELURUH BELANJA KE DALAM SIRUP
- SAAT PELAKSANAAN PENGADAAN, DIHARAPKAN BENAR-BENAR MEMBELANJAKAN SESUAI DENGAN YANG DIRENCAKANAN BERDASARKAN

URUTAN PRIORITAS PRODUK DALAM NEGERI

- AGAR MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN E-PROCUREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA TARGET TRANSAKSI E-PURCHASING MINIMAL 30%
- TERTIB ADMINISTRATIF UNTUK BUKTI KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN NILAI TKDN SEHINGGA MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT PROSES PELAPORAN REALISASI KE DALAM APLIKASI P3DN-SIPD-KEMENDAGRI

5. JIKA TERDAPAT KENDALA TERKAIT P3DN, SILAHKAN TIM P3DN OPD DAPAT BERKOORDINASI DENGAN TIM P3DN

PROVINSI, AGAR DAPAT DITEMUKAN SOLUSI TERBAIK.

BAPAK/IBU YANG SAYA HORMATI,

PROGRAM STRATEGIS P3DN TIDAK DAPAT TERWUJUD JIKA SELURUH STAKEHOLDER TIDAK SALING BERGOTONG ROYONG. PENCAPAIAN POSITIF YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH KETUA HARIAN TIM P3DN PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBELUMNYA, MERUPAKAN HAL YANG PATUT DIAPRESIASI DAN TIDAK TERLEPAS DARI KONSISTENSI DAN PERAN BAPAK/IBU SEKALIAN. OLEH KARENANYA, SAYA BERHARAP SEMANGAT ITU AKAN TERUS BERKOBAR, KOMITMEN ITU AKAN TETAP SAMA, DAN KOLABORASI ITU AKAN TERUS ADA. SEHINGGA TUJUAN DARI PROGRAM P3DN INI TERCAPAI DAN DAPAT

DIRASAKAN KEBERMANFAATANNYA BAGI BANYAK PIHAK.

OLEHNYA BAPAK/IBU, MARI KITA BERSAMA TINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, KARENA KALAU BUKAN KITA ~ SIAPA LAGI ? KALAU TIDAK SEKARANG ~ KAPAN LAGI ?

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, LEBIH DAN KURANGNYA, SAYA MOHON MAAF.

AKHIRNYA DENGAN MEMOHON RIDHO DAN PETUNJUK ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, DIIKUTI DENGAN MENGUCAPKAN : *BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM,* RAPAT KOORDINASI DAN PENGUATAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN P3DN PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024, SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMUALLAIKUM WAR, WAB.
OM SHANTI, SHANTI, SHANTI OM

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Dra. NOVALINA, MM